

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pengelolaan pariwisata adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat maupun Pemerintah dalam melestarikan Objek Wisata. Pengelolaan pariwisata yang ideal perlu memperhatikan misalnya, terkait dampak dan persinggungan adat istiadat atau budaya masyarakat di sekitar daerah tujuan Wisata. Untuk menciptakan suatu tata kelola yang baik, seluruh pihak-pihak yang terkait yang berhubungan langsung dengan dunia pariwisata harus terlibat. Masyarakat, wisatawan, dan Pemerintah daerah harus saling terpadu untuk berupaya secara maksimal mengembangkan potensi tata kelola Wisata yang berkelanjutan.

Tata kelola pariwisata berkelanjutan mempunyai arti upaya tata kelola suatu destinasi dalam hal ini Desa Wisata Religi Bongo, untuk kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengurangi kebutuhan generasi mendatang. Pariwisata bisa berkelanjutan bila tata kelolanya mampu memberikan manfaat yang berkeadilan kepada pihak-pihak yang terkait.

Memang tidak dapat dipungkiri pariwisata bisa mendatangkan banyak manfaat bila dikelola dengan baik, terutama kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Seperti pada tata kelola Desa Wisata yang berbasis kerakyatan, (Suharto, 2012). Hal ini juga banyak diungkap dalam kajian-kajian akademisi sebelumnya, seminar, dan karya yang dapat disimpulkan bahwa pariwisata diterima oleh masyarakat karena memberikan banyak

manfaat dan kecil dampak negatifnya terhadap masyarakat sekitarnya (UNWTO, 2009). Bahkan beberapa daerah yang terbukti dulunya miskin sekarang masyarakatnya sejahtera karena pengaruh pariwisata seperti Kedongan dan Jimbaran di Bali (Suharto, dkk, 2014).

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa masih dijumpai kendala-kendala penyelenggaraan kepariwisataan dalam upaya pembangunan pariwisata berkelanjutan di Desa Wisata Religi Bongo. Misalnya, dalam hal strategi pembinaan, kerangka penataan termasuk didalamnya pembentukan perangkat organisasi yang sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah. Kondisi seperti itu juga masih memerlukan beberapa peraturan daerah serta koordinasi dengan sektor terkait secara terpadu dan mempunyai komitmen bersama untuk kepentingan pemenuhan hajat hidup masyarakat saat ini dan berkelanjutan sampai pada generasi masa depan.

Pengelolaan Desa Wisata Religi ini harus mendapatkan perhatian karena belum berjalan optimal, sehingga menghambat pengembangan pariwisata. Perencanaan pariwisata di Desa Bongo tidak didukung dengan pergerakan dari seluruh pihak yang berkepentingan. Pengelolaan pariwisata tidak melibatkan seluruh pihak yang berhubungan dengan pariwisata. Pengelolaan hanya dilakukan oleh pihak pengurus wisata tersebut, sedangkan masyarakat tidak diberi andil untuk ikut serta dalam pengelolaan. Disini diduga telah terjadi paradoksalitas dibalik Desa Wisata

Religi Bongo dengan adanya klaim Desa Wisata Religi yang tata kelolanya belum mampu memberdayakan masyarakat Desa.

Desa Wisata Religi Bongo cukup dikenal di Gorontalo yang terletak di Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo. Klaim Desa Wisata Religi, Desa Bongo dapat menjadi daya tarik tersendiri di Provinsi Gorontalo. Obyek Desa Wisata Religi dapat digunakan sebagai sarana pengenalan obyek kepada masyarakat terhadap suatu agama tertentu sehingga menumbuhkan semangat toleransi dan kebersamaan.

Klaim Desa Bongo sebagai Desa Wisata Religi sebenarnya sudah cukup lama. Desa Wisata Religi Bongo dikenal dengan tradisi *Walima* yang telah menjadi *icon* Desa ini. Banyak pengunjung yang datang tiap tahun untuk menyaksikan tradisi *Walima* yang dilaksanakan setiap Maulid Nabi Muhammad SAW. Sayangnya, tradisi ini hanya dilaksanakan setahun sekali. Selain tradisi *Walima* yang telah terkenal diseluruh Wilayah Gorontalo, Desa Bongo juga menyimpan daya tarik alam perbukitan, Pantai, dan beberapa peninggalan sejarah. Potensi inilah yang menjadi aset Desa Wisata Religi Bongo yang diharapkan dapat berkembang menjadi daerah tujuan Wisata.

Berdasarkan penelitian sebelumnya Andri dan Suharto (2013) menyatakan bahwa, kendala utama dalam pengembangan Desa Wisata Religi terletak pada tata kelola wisata tersebut. Untuk pengembangan tata kelola Desa Wisata Religi ini diperlukan suatu upaya pengembangan

pariwisata yang berbasis kerakyatan sebagaimana mengacu pada pengertian Desa Wisata berbasis *Community Based Tourism*.

Pariwisata kerakyatan apabila rakyat diperankan. Artinya, partisipasi masyarakat diperlukan baik pada saat merencanakan, melaksanakan, pengawasan, maupun pada saat mendapatkan manfaat dari pariwisata ini (Kaho, 1987).

Beberapa kajian sebelumnya Suharto (2012:2014); Andri dan Suharto (2013); Kaho (1987) juga menyimpulkan hal-hal yang sama, hampir dibeberapa tata kelola Desa Wisata dan Wisata Religi masyarakat cenderung kurang diberdayakan dalam pengembangan pariwisata, sehingga masyarakat hanya menjadi penonton ketika objek Wisata di daerah mereka dikelola oleh pihak tertentu tanpa bisa menikmati hasil dari daerahnya sendiri. Begitu juga pengelolaan objek Desa Wisata Religi Bongo, masih dikelola secara kekeluargaan, dimana masyarakat kurang dilibatkan secara langsung dalam pengembangan wisata yang ada di Desa Bongo. Obyek Wisata tersebut seolah-olah hanya dimiliki oleh keluarga yang bersangkutan. Meskipun mengklaim Desa Wisata yang mana aparat Desa dan masyarakatnya belum dilibatkan yang dikhawatirkan bisa memicu konflik sosial.

Untuk itu diperlukan suatu pengembangan tata kelola yang baik untuk menciptakan pariwisata yang baik. Pengelolaan menurut Leiper (dalam Pitana dan Diarta, 2009) merujuk kepada seperangkat peranan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, atau bisa juga merujuk

kepada fungsi–fungsi yang melekat pada peran tersebut, diantaranya *Planning, Directing, Organizing, dan Controlling*. Yang paling sederhana dikemukakan oleh George R. Terry melalui rumusnya yang dikenal dengan akronim berbunyi POAC sebagai singkatan dari *planning, organizing, actuating, and controlling*.

Secara umum, pihak pengelola telah berusaha secara maksimal dalam hal tata kelola Desa Wisata Religi Bongo. Misalnya dalam hal pelaksanaan event tahunan festival walima yang dijalankan dengan cukup baik. Utamanya kemampuan dalam tahap perencanaan, pengorganisasian, hingga pelaksanaan. Selanjutnya kapasitas pengelola dalam mengolah cinderamata sudah cukup baik. Mereka mampu menginisiatif pendirian sebuah gerai cinderamata. Persoalannya terdapat pada kualitas cinderamata dan kemampuan memasarkannya. Dalam hal pelayanan terhadap wisatawan masih kurang memadai dimana pengelola belum mampu memenuhi kuantitas dan kualitas tenaga pemandu wisata. Pihak pengelola telah berusaha menyiapkan akomodasi berupa *homestay* layaknya Desa-Desa Wisata lain.

Dalam hal perencanaan pariwisata, pihak pengelola memiliki peran utama dalam pengambilan keputusan kegiatan menetapkan tujuan dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan yang dilakukan untuk pengembangan tata kelola di Desa Bongo yaitu dengan pembangunan beberapa fasilitas pariwisata untuk menambah

keindahan Desa Wisata Religi yang ada di Desa Bongo dan pembentukan suatu organisasi masyarakat pariwisata.

Dengan adanya organisasi masyarakat tersebut, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi melalui gerakan sadar wisata. Namun karena belum adanya keterpaduan diantara masing-masing pihak terkait, yaitu kemitraan pelaku pariwisata yang belum optimal, sehingga terkesan satu dengan lainnya berjalan sendiri-sendiri. Pihak pengelola menjalankan pariwisata dengan tidak melibatkan masyarakat sekitar secara langsung. Pariwisata di Desa Bongo hanya melibatkan keluarga pihak pengelola.

Selanjutnya sesuai dengan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, pihak masyarakat sebenarnya sangat mendukung wisata ini untuk dikelola lebih baik lagi, agar dapat mendukung perekonomian masyarakat lokal. Masyarakat berharap mereka dapat dilibatkan dalam pengelolaan obyek Wisata yang ada di Desa Bongo. Mereka juga berharap kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Pariwisata agar bisa memberikan kontribusi dalam bentuk kerja sama dengan pihak pengelola sekaligus dapat memberikan satu peluang kepada masyarakat demi peningkatan pengelolaan terhadap objek Desa Wisata Religi ini.

Uraian permasalahan diatas mengerucut pada substansi untuk meneliti tentang tata kelola Desa Wisata Religi Bongo ini, Penulis mengambil judul **“Tata Kelola Desa Wisata Religi (Kajian *Community Based Tourism* Di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Melihat semua hal yang melatar belakangi masalah diatas. Penulis mengidentifikasi permasalahan ini berdasarkan teori pengelolaan pariwisata POAC:

Pertama, pihak pengelola telah melakukan perencanaan mengenai pariwisata yang ada di Desa Bongo dan menciptakan suatu organisasi (PKBM YOTAMA dan Yayasan Walima Emas Bubohu), namun hal itu tidak berjalan dengan baik karena tidak adanya sinergitas *stakeholders*. Kedua, pengelola menjalankan pariwisata dengan tidak melibatkan masyarakat sekitar secara langsung, padahal klaimnya Desa Wisata Religi. Ketiga, Desa Wisata Religi ini cenderung dikelola dengan sistim kekeluargaan belum mengacu pada konsep CBT dengan modal sosial sebagai aset utamanya.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi tersebut, masalah penelitian ini adalah bagaimanakah tata kelola Desa Wisata Religi Bongo berbasis CBT diterapkan? serta faktor–faktor apa yang menjadi penghambat diterapkannya tata kelola Desa Wisata Religi Bongo berbasis CBT?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis tata kelola Desa Wisata Religi Bongo berbasis CBT diterapkan dan untuk mengetahui Faktor–faktor apa yang menjadi penghambat diterapkannya tata kelola Desa Wisata Religi Bongo.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Akademis**

Sebagai alternatif referensi dalam kajian akademisi terkait keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Religi berbasis CBT. Selain itu penelitian ini bisa sebagai acuan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tata kelola pariwisata di Desa Bongo.

### **2. Manfaat Praktis**

Menjadi acuan bahan pertimbangan pemerintah, masyarakat, dan pengusaha dalam melakukan rencana tindakpengelolaan Desa Wisata. Selain itu manfaat penelitian ini bisa digunakan sebagai dasar membuat kebijakan.